

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP REALISASI BELANJA MODAL

Didik Purwanto

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: didik.soetrisno69@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the significance of the effect of economic growth, local revenue and general allocation funds, GDP partially on capital expenditure at the district / city in Central Java province. This study uses census study approach at Regency / City in Central Java period 2011 – 2013. The population in this study are all Regency / City Central Java as many as 35 districts / cities are composed of 29 districts and 6 Cities. Data analysis technique used classic assumption test, multiple linear regression analysis, t test, F test and coefficient of determination. The results were obtained conclusion: The results of the analysis we concluded that PAD and DAU positive and significant impact on the allocation of capital expenditure at the district / city in Central Java province. While variable economic growth and GDP does not significantly influence the allocation of capital expenditure at the district / city in Central Java province. Determination coefficient analysis results obtained value of Adjusted R Square = 0,763 means known that the influence exerted by the economic growth, revenue, General Allocation Fund and GDP on the capex to 76,3 percent while the rest (100% - 76,3%) = 23,7 percent influenced by other factors outside variables studied.

Keywords: *economic growth, regional income, general allocation funds, GDP, the allocation of capital expenditure.*

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Tengah dalam sistem otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran belanja seharusnya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya dialokasikan untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa pengalokasian anggaran

belanja modal untuk kepentingan publik sangatlah penting. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (Kawedar, 2008). Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah (Sularno, 2013: 14). PDRB ini terdiri dari PDRB Riil dan PDRB Nominal. PDRB Riil nilainya diukur atas dasar harga konstan, sedangkan PDRB Nominal adalah PDRB yang dinilai atas dasar harga berlaku. Dalam menghitung PDRB suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan, sektor-sektor produksi yang dihitung terdiri dari 9 (sembilan) sektor, yaitu: (i) Pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan dan perkebunan; (ii) Pertambangan dan penggalian; (iii) Industri pengolahan; (iv) Listrik, gas dan air

bersih; (v) Bangunan; (vi) Perdagangan, hotel dan restoran; (vii) Pengangkutan dan Komunikasi; (viii) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan (xi) Jasa-jasa (Devi Asih Indiyani, 2013).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2011). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2011). Variabel-variabel yang digunakan di antaranya pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan penambahan variabel PDRB karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devi Asih Indiyani (2013) PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel independen yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peneliti menggunakan periode penelitian 2011 – 2013, karena dengan menggunakan data tiga tahun terakhir dari penyusunan penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Motivasi penelitian ini adalah untuk mengkaji kembali penelitian Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Nugroho Suratno Putro (2011) serta mengetahui apakah variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Alasan lainnya yaitu dalam alokasi belanja modal masing-masing daerah belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, PDRB secara parsial terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2011 – 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Jumlah sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kabupaten/kota, sehingga merupakan penelitian sensus.

Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian daerah dari suatu tahun ke tahun berikutnya diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan karena mencerminkan pertumbuhan riil dari sektor-sektor ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah digunakan rumus :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_{it} - \text{PDRB}_{it-1}}{\text{PDRB}_{it-1}} \times 100$$

Dimana:

PDRB_{it} = PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota i tahun t

$PDRB_{it-1}$ = PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten/Kota i tahun t-1

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2011 – 2013.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan realisasi penerimaan asli daerah yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa suatu faktor produksi di suatu daerah. PDRB ini diukur dengan menggunakan PDRB diukur atas dasar harga konstan.

6. Alokasi Belanja Modal

Alokasi belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, rneningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Alokasi Belanja modal diukur dengan satuan ribu rupiah.

Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS.
- b. Uji Autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data resi-dual terjadi secara random atau tidak.
- c. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen.
- d. Uji Normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 16.

2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda.

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 1 berikut:

Tabel 1: Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji Multikolinearitas	Tolerance (0,757); (0,250); (0,765); (0,256) > 0,1 VIF (1,321); (4,006); (1,307); (3,904) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji Autokorelasi	P (1,000) > 0,05	Tidak ada Autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	P (0,646); (0,917); (0,719); (0,343) > 0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Uji Normalitas	P (0,983) > 0,05	Residual normal

Sumber: Pengolahan data sekunder 2014

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan PDRB (X_4) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y)

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
(Constant)	170858152,669	1,269	0,214
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	-16971592,026	-0,701	0,489
Pendapatan Asli Daerah (X_2)	0,861	3,792	0,001
Dana Alokasi Umum (X_3)	0,234	2,903	0,007
PDRB (X_4)	5,704	0,988	0,331
Adjusted R Square = 0,763			
F-hitung = 24,720			
Sig. F = 0,000			

Sumber: Data penelitian diolah 2015

Adapun hasil analisis uji t adalah:

- Pengujian signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 diperoleh t hitung sebesar -0,701 dengan *probability value* sebesar 0,489 > 0,05 maka H_0 diterima, berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, tidak terbukti kebenarannya.
- Pengujian signifikansi pengaruh pendapatan asli daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 diperoleh nilai t hitung sebesar 3,792 dengan *probability value* sebesar 0,001 < 0,05 maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, terbukti kebenarannya.
- Pengujian signifikansi pengaruh Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,903 dengan *probability value* sebesar 0,007 < 0,05 maka H_0 ditolak berarti

ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, terbukti kebenarannya.

- d. Pengujian signifikansi pengaruh PDRB (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 diperoleh nilai t hitung sebesar 0,988 dengan *probability value* sebesar $0,331 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif tidak signifikan PDRB (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan PDRB terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, tidak terbukti kebenarannya.

Uji F

Hasil analisis diperoleh *probability value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan PDRB (X_4) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013.

Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,763 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan PDRB (X_4) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 sebesar 76,3 persen sedangkan sisanya ($100\% - 76,3\%$) = 23,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X_1) terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil analisis diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013, sehingga hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Hasil penelitian ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2011) dan Darwanto Dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan publik, hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja pemerintah daerah untuk berbagai kepentingan publik. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam

pula. Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah, sehingga hipotesis yang diajukan terbukti. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darwanto Dan Yulia Yustikasari (2007) dan Surya Hamdani (2012) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian PAD, sebab semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah, bukan sumber pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan Pendapatan Daerah.

Semakin besar upaya maksimalisasi Pendapatan Asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengertian bahwa keleluasaan yang dimiliki oleh daerah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang baru. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil analisis diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013, sehingga hipotesis yang diajukan terbukti. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro (2011), Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) dan Surya Hamdani (2012) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

4. Pengaruh PDRB terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil analisis diperoleh kesimpulan tidak ada pengaruh yang signifikan PDRB terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013, sehingga hipotesis yang diajukan tidak terbukti. Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Devi Asih Indiyani (2013) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Artinya PDRB tidak memiliki kontribusi positif terhadap belanja modal atau kontribusi yang

disumbangkan oleh PDRB terhadap belanja modal adalah negatif. Ini bukan berarti bahwa dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal, PDRB tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.

Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Tengah masih mengharapkan transfer bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil dibanding sumber-sumber penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari begitu besarnya kontribusi dana perimbangan yang relatif lebih besar. Demikian pula, keterlambatan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam penetapan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi (X_1) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, tidak terbukti kebenarannya.

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah (X_2) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, terbukti kebenarannya.

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum (X_3) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, terbukti kebenarannya.

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh positif tidak signifikan PDRB (X_4) terhadap Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013. Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif dan signifikan PDRB terhadap Alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013”, tidak terbukti kebenarannya.

Hasil analisis uji F diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan PDRB (X_4) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013.

Hasil analisis koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,763 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi (X_1), pendapatan asli daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3) dan PDRB (X_4) terhadap variabel terikat yaitu Alokasi belanja modal (Y) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011 – 2013 sebesar 76,3 persen sedangkan sisanya ($100\% - 76,3\%$) = 23,7 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk alokasi belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya kabupaten/kota di Jawa Tengah perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Optimalisasi potensi penerimaan daerah dalam bentuk PAD merupakan salah satu alternatif sumber penerimaan utama. Untuk itu peningkatan PAD dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan peningkatan PAD.

Manajemen pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal perlu lebih diprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja modal harus lebih difokuskan pada sektor-sektor yang mampu mendorong peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2009, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad Yani, 2002, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arbie Gugus Wandira, 2013, Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal, *Accounting Analysis Journal*, Volume 2 No. 1 Tahun 2013, Hal. 48.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar, 26-28 Juli 2007. Hal. 59.
- Devi Asih Indiyani, 2013, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006-2012, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Hal. 23-24.
- Imam Ghozali, 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Marihot P. Siahaan, 2005, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho Suratno Putro, 2011, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*, Semarang. Hal. 52.
- Surya Hamdani, 2012, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman*. Hal. 25.
- www.jateng.bps.go.id. jawa tengah dalam angka 2014.
- www.djpk.depkeu.go.id. dana alokasi umum tahun 2011 – 2013.